

Tantangan dan Peluang Implementasi Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa-Desa di Indonesia

(Challenges and Opportunities for Implementing Participatory Village Development Planning in Indonesia)

Olvit Olniwati Kayupa¹, Feliks Arfid Guampe^{2*}, Join Hengkeng³, Mikhael Jibrael Balo⁴
Universitas Kristen Tentena, Sulawesi Tengah, Indonesia^{1,2,3,4}
Olvitkayupa27@gmail.com¹, felixsguampe@gmail.com^{2*}, joinhengkengposo@gmail.com³,
mikhaeljibril246@gmail.com⁴



Riwayat Artikel

Diterima pada 29 Agustus 2024
Revisi 1 pada 15 Oktober 2024
Revisi 2 pada 4 Desember 2024
Revisi 3 pada 16 Desember 2024
Disetujui pada 19 Desember 2024

Abstract

Purpose: This study evaluates participatory development planning in Indonesian villages and identifies challenges and opportunities for improvement.

Methodology: A literature review of 50 articles and reports was conducted, using content analysis to interpret findings.

Results: The study identifies challenges such as low community involvement, elite dominance, ineffective communication, and unequal education access, while highlighting opportunities for improvement through capacity building, policy reform, innovative methods, and enhanced collaboration between village authorities, NGOs, and academic institutions.

Conclusion: This study emphasizes the importance of community participation in village development planning as a foundation for achieving sustainable and inclusive development.

Limitations: The study's reliance on existing literature may limit the depth of understanding of current practices.

Contribution: The research provides insights to improve participatory development planning in Indonesian villages, guiding policymakers, researchers, and practitioners.

Keywords: *Community Participation, Participatory Planning, Village Development.*

How to Cite: Kayupa, O. O., Guampe, F. A., Hengkeng, J., Balo, M. J. (2025). Tantangan dan Peluang Implementasi Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa-Desa di Indonesia. *Studi Ilmu Manajemen dan Organisasi*, 6(1), 187-199.

1. Pendahuluan

Implementasi perencanaan pembangunan partisipatif di desa-desa Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang signifikan. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), merupakan elemen kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Pendekatan partisipatif ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan relevansi program pembangunan dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam setiap tahapnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses perencanaan itu sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya untuk melibatkan masyarakat, banyak yang masih merasa sebagai "objek pembangunan" ketimbang "subjek pembangunan" (Nurhaliza, 2023). Hal ini diperparah oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat desa tentang proses perencanaan dan penganggaran, yang membuat mereka sulit untuk berpartisipasi secara efektif (Agung et al., 2022; Halim & Adiarto, 2021; Purwaningsih, 2022). Selain itu, di tingkat desa seringkali terdapat kekurangan

fasilitator yang mampu mendorong partisipasi masyarakat secara efektif, sehingga proses perencanaan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Halim & Adianto, 2021; Hidayat et al., 2023). Hambatan struktural seperti mentalitas aparat desa yang cenderung otoriter dan kurangnya fasilitas pendukung juga menjadi penghambat utama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat (Arisandi, 2021).

Di sisi lain, terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Pendekatan komunikasi yang inklusif telah terbukti mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat, sehingga mereka merasa lebih memiliki proses pembangunan (Nurhaliza, 2023; Silvia & Sujianto, 2021). Selain itu, pelatihan bagi fasilitator desa untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mendampingi masyarakat dapat menjadi strategi yang efektif untuk mendorong partisipasi yang lebih aktif dan produktif (Hidayat et al., 2023). Kepemimpinan kepala desa yang proaktif juga memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa. Kepala desa yang mampu membangun kepercayaan dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat akan menghasilkan proses perencanaan yang lebih relevan dan berkelanjutan (Rahmat & Hermana, 2020; Yusuf et al., 2020).

Motivasi penelitian ini berasal dari kebutuhan untuk memahami secara mendalam faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi perencanaan pembangunan partisipatif di desa-desa Indonesia. Dengan mengevaluasi tantangan dan peluang yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan efektivitas perencanaan pembangunan partisipatif, sehingga pembangunan desa dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung terciptanya pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi perencanaan pembangunan partisipatif di desa-desa Indonesia, mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi, serta mengungkap peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki pelaksanaannya di masa depan. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang relevan dan aplikatif untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan partisipatif, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa.

2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis

2.1 Teori Partisipasi Masyarakat

Teori partisipasi masyarakat merupakan konsep yang esensial dalam berbagai bidang, termasuk pengembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks ini, teori partisipasi yang dikemukakan oleh Arnstein (1969) menjadi acuan penting, di mana partisipasi diidentikkan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh masyarakat, dan keberhasilan suatu program sangat bergantung pada seberapa besar masyarakat terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program tersebut (Rahmawati, 2022; Tuhana et al., 2022; Wahyudi & Khotimah, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi, (2013) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam program rehabilitasi lahan bervariasi pada setiap tahap. Pada tahap perencanaan, partisipasi masyarakat masih berada pada tingkat *informing* dan *consultation*, sedangkan pada tahap pelaksanaan, partisipasi meningkat menjadi *cooperation* dan *community control*. Hal ini menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap sangat penting untuk keberhasilan program. Selain itu, Ardika, (2020) menekankan bahwa dalam pengembangan desa wisata berbasis partisipasi, dukungan dan penerimaan masyarakat terhadap rencana dan program sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan pengembangan tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat juga perlu diperhatikan. Menurut Pertiwi & Nugroho, (2022), tingkat pendidikan, lama tinggal, dan keaktifan organisasi merupakan faktor yang

berbanding lurus dengan tingkat partisipasi masyarakat. Penelitian oleh Fatimatu Zahroh et al., (2021) menunjukkan bahwa masyarakat yang paling terdampak dari kegiatan rehabilitasi mangrove memiliki peran penting dalam keberhasilan program tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya penting dalam konteks pengambilan keputusan, tetapi juga dalam implementasi program yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Lebih lanjut, Sunarti, (2022) mengungkapkan tantangan dalam pengembangan wisata yang harus diperhatikan, yaitu dinamika partisipasi masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat harus menjadi pertimbangan penting dalam pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan wisata. Selain itu, penelitian oleh Sufriadi & Zakaria, (2021) menyoroti pentingnya peran tokoh masyarakat dan fasilitator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dari berbagai pihak sangat penting untuk mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif.

Secara keseluruhan, teori partisipasi masyarakat menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan. Partisipasi yang aktif tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk memiliki kontrol atas keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu, strategi pengembangan partisipasi masyarakat harus mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi keterlibatan mereka, serta menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi secara aktif dalam setiap tahap program. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi fondasi yang kuat untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal.

2.2 Teori Pembangunan Partisipatif

Teori pembangunan partisipatif merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Konsep ini berakar dari pemahaman bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya sekadar kehadiran dalam kegiatan pembangunan, tetapi juga mencakup peran aktif dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil pembangunan. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program pembangunan, serta memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap hasil pembangunan tersebut (Hafrida et al., 2023; Idawati, 2022; Wahyuni et al., 2022).

Salah satu aspek penting dari pembangunan partisipatif adalah komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Komunikasi dua arah menjadi kunci dalam membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pembangunan. Penelitian oleh Idawati menunjukkan bahwa rendahnya tingkat partisipasi masyarakat sering kali disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang tanggung jawab bersama dalam pembangunan (Idawati, 2022). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan bimbingan dan penanaman nilai kesadaran kepada masyarakat agar mereka mau berpartisipasi secara aktif (Idawati, 2022; Tuhana et al., 2022; Wahyudi & Khotimah, 2022).

Dalam konteks otonomi daerah, Agusta menekankan bahwa pembangunan partisipatif harus dioperasionalkan dalam konteks birokrasi pemerintahan, di mana pendekatan bottom-up menjadi sangat relevan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat harus diintegrasikan dalam struktur pemerintahan untuk mencapai hasil yang optimal (Agusta, 2009). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), merupakan indikator penting dari tata kelola pemerintahan yang baik (Angreni, 2021; Irham, 2019; Nabilah, 2021). Melalui Musrenbang, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka, yang kemudian diakomodasi dalam rencana pembangunan daerah.

Namun, tantangan dalam implementasi pembangunan partisipatif tetap ada. Beberapa penelitian mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, seperti kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, mentalitas aparat pemerintah yang elitis, dan kurangnya fasilitas yang memadai untuk mendukung partisipasi masyarakat (Arisandi, 2021; Harfis, 2019). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis dari pemerintah untuk menciptakan iklim yang mendukung partisipasi masyarakat, termasuk pelatihan dan penyuluhan yang memadai (Daraba, 2017).

Secara keseluruhan, teori pembangunan partisipatif menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi milik bersama yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Asmaria et al., 2020; Hermawan & Hutagalung, 2021).

2.3 Teori Perencanaan Pembangunan

Teori perencanaan pembangunan merupakan suatu bidang yang kompleks dan multidimensional, yang mencakup berbagai pendekatan dan metodologi. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana teori-teori perencanaan dapat diterapkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Salah satu pendekatan yang menarik adalah model perencanaan yang dioptimalkan energi, seperti yang diusulkan oleh Sikder et al. dalam studi mereka tentang pengembangan pemukiman di Dhaka, Bangladesh. Mereka menunjukkan bahwa penerapan model "EnUp" dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dapat diterapkan dalam perencanaan pemukiman baru serta perbaikan pemukiman yang sudah ada, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan masukan teknis (Sikder et al., 2016).

Di sisi lain, Kosunen dan Hirvonen-Kantola menyoroti pentingnya memahami perencanaan sebagai proses yang ko-evolusi, di mana perencanaan tidak hanya bersifat proaktif tetapi juga adaptif terhadap perubahan yang tidak terduga. Mereka menggunakan Teori Budaya untuk menggambarkan bagaimana perencanaan dapat memotivasi pengembangan sambil mengakui ketidakpastian masa depan (Kosunen & Hirvonen-Kantola, 2020). Pendekatan ini menunjukkan bahwa perencanaan harus mampu mengelola kompleksitas dan ketidakpastian, yang sering kali menjadi tantangan utama dalam praktik perencanaan. Lebih jauh lagi, Rydin mengemukakan bahwa teori jaringan aktor (ANT) dapat memberikan kerangka konseptual yang berguna untuk memahami praktik perencanaan yang ada dan untuk mempromosikan praktik perencanaan yang lebih baik. Dengan menggabungkan elemen-elemen ANT dengan teori rezim perkotaan, Rydin menciptakan perspektif aktor-relasional yang dapat membantu dalam memahami dinamika kekuasaan dan interaksi antara berbagai aktor dalam proses perencanaan (Rydin, 2010). Ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya tentang pengambilan keputusan teknis, tetapi juga tentang interaksi sosial dan politik yang kompleks.

Dalam konteks yang lebih luas, perencanaan pembangunan juga harus mempertimbangkan kepentingan publik dan representasi dalam pengambilan keputusan. Zhao menyoroti bahwa mekanisme untuk menangkap dan mewakili kepentingan publik dalam perencanaan telah melalui berbagai eksperimen, tetapi masih ada tantangan dalam mendefinisikan "publik" dan menangkap kepentingan publik dalam praktik perencanaan (Zhao, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi publik dan legitimasi dalam proses perencanaan adalah aspek yang sangat penting untuk mencapai hasil yang adil dan berkelanjutan. Akhirnya, penting untuk mencatat bahwa perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan konteks lokal dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh setiap wilayah. Sebagai contoh, Alem membahas bagaimana perencanaan di Ethiopia sering kali terkait dengan ketidakadilan dan konflik, yang menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam perencanaan (Alem, 2021). Dengan demikian, teori perencanaan pembangunan harus terus berkembang untuk mencerminkan realitas yang kompleks dan beragam dari berbagai konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan.

3. Metodologi penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur (*literature review*) untuk mengevaluasi implementasi perencanaan pembangunan partisipatif di desa-desa Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menilai, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber yang relevan guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai topik yang diteliti. Secara keseluruhan, penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasi perencanaan pembangunan partisipatif di tingkat desa.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi tinjauan literatur (literature review) yang termasuk dalam kategori penelitian sekunder. Tidak ada pengumpulan data primer yang dilakukan, melainkan analisis mendalam terhadap data dan informasi yang telah dipublikasikan sebelumnya dalam bentuk artikel ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan.

3.2 Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Artikel Ilmiah: Artikel yang diterbitkan dalam jurnal akademik yang relevan dengan topik perencanaan pembangunan partisipatif di desa-desa Indonesia.
2. Laporan Penelitian: Laporan dari berbagai lembaga penelitian yang membahas implementasi perencanaan pembangunan partisipatif.
3. Dokumen Kebijakan: Kebijakan pemerintah terkait desentralisasi, otonomi daerah, dan perencanaan pembangunan desa.

3.3 Kriteria Seleksi Sumber

Untuk memastikan relevansi dan kualitas data, artikel dan dokumen yang dianalisis dipilih berdasarkan kriteria berikut:

1. Relevansi: Fokus pada perencanaan pembangunan partisipatif di Indonesia.
2. Periode Publikasi: Dipublikasikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2014-2024) untuk memastikan data dan informasi yang digunakan masih aktual dan relevan.
3. Reputasi Jurnal: Artikel yang diterbitkan dalam jurnal dengan reputasi baik atau disusun oleh institusi yang kredibel.
4. Bahasa: Artikel dan dokumen yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris untuk cakupan yang lebih luas.

3.4 Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sistematis menggunakan database Google Scholar. Kata kunci yang digunakan antara lain "perencanaan pembangunan partisipatif", "Musrenbangdes", "partisipasi masyarakat desa", dan "pembangunan desa berkelanjutan". Selain itu, referensi dari artikel yang relevan juga diperiksa untuk menemukan sumber-sumber tambahan yang mungkin terlewatkan dalam pencarian awal.

3.5 Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data: Menyeleksi bagian-bagian penting dari setiap artikel yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Bagian yang tidak relevan atau tidak mendukung tujuan penelitian diabaikan.
2. Koding: Mengkategorikan data berdasarkan tema atau konsep yang muncul, seperti tantangan dalam pelaksanaan, peluang untuk perbaikan, dan rekomendasi kebijakan. Koding dilakukan secara induktif untuk mengidentifikasi pola-pola utama dalam data.
3. Penyajian Data: Menyusun hasil analisis dalam bentuk narasi deskriptif yang memudahkan interpretasi. Data disajikan secara sistematis sesuai dengan tema-tema yang telah diidentifikasi.
4. Penarikan Kesimpulan: Menyimpulkan temuan utama yang memberikan wawasan mengenai implementasi perencanaan pembangunan partisipatif di desa-desa Indonesia.

3.6 Alat dan Perangkat Lunak

Untuk mendukung proses analisis data, peneliti menggunakan perangkat lunak NVivo versi 12 dari QSR International. NVivo digunakan untuk mempermudah proses koding dan pengorganisasian data secara sistematis. Selain itu, Microsoft Excel digunakan untuk mengelola data awal dan melakukan perhitungan statistik deskriptif jika diperlukan.

4. Hasil dan pembahasan

Implementasi perencanaan pembangunan partisipatif di desa-desa Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Berdasarkan tinjauan literatur,

hasil penelitian ini mengidentifikasi tiga aspek utama yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan: faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, tantangan utama dalam perencanaan pembangunan partisipatif, dan peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

4.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi karakteristik individu dan kapasitas sumber daya manusia, sementara faktor eksternal mencakup aspek struktural dan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat.

1. **Tingkat Pendidikan dan Pemahaman Masyarakat.** Tingkat pendidikan masyarakat merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi partisipasi mereka dalam Musrenbangdes. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang proses perencanaan dan penganggaran, sehingga mereka lebih mampu untuk berkontribusi secara efektif dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Dewi, (2013) menemukan bahwa pada tahap pelaksanaan program rehabilitasi lahan, partisipasi masyarakat meningkat ketika mereka memiliki pengetahuan yang memadai tentang program tersebut. Sebaliknya, masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah sering kali merasa kesulitan untuk memahami kompleksitas proses perencanaan, yang mengakibatkan partisipasi mereka tetap berada pada tingkat *informing* dan *consultation*.
2. **Kapasitas Sumber Daya Manusia di Tingkat Desa.** Kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa juga memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi masyarakat. Kekurangan fasilitator yang kompeten dapat menghambat proses partisipatif, karena fasilitator yang tidak memiliki keterampilan memadai dalam mengelola dialog dan mengakomodasi aspirasi masyarakat akan sulit untuk mendorong keterlibatan aktif. Hidayat et al., (2023) menekankan pentingnya pelatihan bagi pendamping desa untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat secara efektif. Dengan adanya fasilitator yang terlatih, proses perencanaan dapat berjalan lebih lancar dan hasilnya lebih mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat.
3. **Kepemimpinan Kepala Desa yang Proaktif.** Kepemimpinan kepala desa yang proaktif dan mendukung partisipasi masyarakat juga menjadi faktor krusial. Kepala desa yang mampu membangun kepercayaan dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat akan menciptakan suasana yang kondusif untuk partisipasi yang lebih besar. Rahmat & Hermana, (2020) menunjukkan bahwa kepemimpinan yang baik dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa, karena kepala desa yang proaktif akan lebih mudah dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan mengintegrasikannya ke dalam rencana pembangunan. Selain itu, Yusuf et al., (2020) menekankan bahwa kepala desa yang transparan dalam pengambilan keputusan akan meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap proses pembangunan, sehingga mendorong partisipasi yang lebih aktif.
4. **Faktor Demografis dan Sosial.** Selain faktor-faktor yang telah disebutkan, faktor demografis seperti usia, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Penelitian oleh Pertiwi & Nugroho, (2022) menunjukkan bahwa masyarakat yang lebih tua dan memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi cenderung lebih aktif dalam partisipasi pembangunan. Selain itu, keaktifan organisasi masyarakat seperti kelompok tani, koperasi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat secara luas (Pertiwi & Nugroho, 2022).

4.2 Tantangan Utama dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa-Desa Indonesia

Meskipun terdapat berbagai faktor yang dapat mendukung partisipasi masyarakat, implementasi perencanaan pembangunan partisipatif di desa-desa Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Tantangan-tantangan ini mencakup rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, dominasi elite desa dalam pengambilan keputusan, komunikasi yang kurang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat, serta ketidakmerataan akses pendidikan.

1. **Rendahnya Tingkat Partisipasi Masyarakat.** Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes adalah tantangan utama yang diidentifikasi. Nurhaliza, (2023) mencatat bahwa banyak masyarakat merasa sebagai "objek pembangunan" ketimbang "subjek pembangunan," yang mengurangi motivasi mereka untuk berpartisipasi secara aktif. Hal ini diperparah oleh kurangnya

- pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang proses perencanaan dan penganggaran, sehingga mereka merasa tidak mampu untuk memberikan kontribusi yang berarti (Purwaningsih, 2022). Contoh nyata dari hal ini dapat dilihat di Desa Sugio, Kabupaten Lamongan, di mana dominasi pemerintah desa dalam pengambilan keputusan menyebabkan partisipasi masyarakat tetap rendah meskipun telah dilakukan Musrenbangdes secara rutin (Laily, 2015).
2. **Dominasi Elite Desa dalam Pengambilan Keputusan.** Struktur kekuasaan yang ada di desa sering kali didominasi oleh elite desa atau kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kedekatan dengan aparat pemerintah desa. Akbar et al., (2018) menemukan bahwa dominasi elit dalam proses perencanaan mengurangi representasi kelompok masyarakat yang lebih luas, terutama kelompok marginal seperti perempuan dan masyarakat miskin. Hal ini tidak hanya mengurangi legitimasi proses perencanaan, tetapi juga menyebabkan program pembangunan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Misalnya, di Desa Jatimulya, Kabupaten Boalemo, meskipun kepemimpinan yang kuat dan komunikasi yang efektif dapat meningkatkan partisipasi, partisipasi masih terbatas pada kelompok-kelompok tertentu, sementara kelompok marginal masih kurang terwakili (Akbar et al., 2018).
 3. **Komunikasi yang Kurang Efektif antara Pemerintah Desa dan Masyarakat.** Komunikasi yang tidak efektif antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi hambatan signifikan dalam meningkatkan partisipasi. Laily (2015) menunjukkan bahwa desa yang memiliki mekanisme komunikasi yang baik, di mana informasi tentang rencana pembangunan disampaikan secara transparan dan berkala, cenderung memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi. Sebaliknya, di desa-desa di mana komunikasi ini buruk, masyarakat sering kali merasa tidak memiliki cukup informasi atau kesempatan untuk berkontribusi dalam proses perencanaan. Ketidaktransparanan dalam proses perencanaan menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat, yang pada akhirnya mengurangi motivasi mereka untuk berpartisipasi (Adam & Towadi, 2022; Laily, 2015).
 4. **Ketidakterataan Akses Pendidikan dan Informasi.** Ketidakterataan dalam akses pendidikan dan informasi di desa-desa juga menjadi tantangan yang signifikan. Tanpa pendidikan yang memadai, masyarakat mungkin tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang diperlukan untuk terlibat secara aktif dalam proses perencanaan (Listyawati et al., 2023). Penelitian oleh Hulu et al., (2018) menunjukkan bahwa peningkatan akses pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat desa sangat penting untuk meningkatkan partisipasi dan efektivitas perencanaan pembangunan. Ketidakterataan ini tidak hanya membatasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, tetapi juga menghambat pemberdayaan mereka untuk berkontribusi secara signifikan dalam pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan.

4.3 Peluang dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa-Desa Indonesia

Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, implementasi perencanaan pembangunan partisipatif di desa-desa Indonesia juga menawarkan berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan efektivitas program pembangunan. Salah satu peluang utama adalah peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat desa melalui pelatihan dan pemberdayaan. Laily, (2015) dan Sutrisna, (2023) menekankan pentingnya pelatihan yang dirancang khusus untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dan pentingnya partisipasi dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, pelatihan bagi fasilitator desa dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mendampingi masyarakat secara efektif, sehingga proses perencanaan dapat berjalan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1. **Reformasi Kebijakan dan Penguatan Kerangka Hukum.** Reformasi kebijakan juga menjadi peluang penting dalam memperbaiki implementasi perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa perencanaan pembangunan desa harus dilakukan secara partisipatif, melibatkan seluruh lapisan masyarakat (Susetiawan et al., 2018). Pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat kerangka hukum yang mendukung partisipasi masyarakat dengan memastikan adanya mekanisme yang transparan dan akuntabel dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa (Akbar et al., 2018). Dengan adanya kebijakan yang mendukung, kepercayaan masyarakat terhadap proses perencanaan akan meningkat, sehingga mendorong partisipasi yang lebih aktif.
2. **Inovasi dalam Metode Partisipasi melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).** Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menawarkan peluang besar untuk meningkatkan

- partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Setiawan (2020) menunjukkan bahwa platform online atau aplikasi mobile yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, dan mengikuti perkembangan proses perencanaan dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, metode partisipasi yang lebih kreatif seperti pemetaan partisipatif telah terbukti efektif dalam melibatkan masyarakat secara lebih mendalam dalam proses pembangunan. Contoh implementasi pemetaan partisipatif di Desa Semabung dan Desa Ngepung menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dan memastikan bahwa rencana pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal (Handoko & Tucunan, 2021; Rendra et al., 2024).
3. Penguatan Kolaborasi antara Pemerintah Desa, Organisasi Non-Pemerintah, dan Lembaga Akademis. Penguatan kolaborasi antara pemerintah desa, organisasi non-pemerintah (LSM), dan lembaga akademis juga merupakan peluang penting dalam memperbaiki implementasi perencanaan partisipatif. Marlita & Widodo, (2020) menekankan bahwa kerjasama ini dapat menghasilkan program-program intervensi yang lebih terstruktur dan berbasis pada penelitian, yang tidak hanya meningkatkan kapasitas masyarakat tetapi juga memperkenalkan metode partisipasi yang inovatif dan efektif. Kolaborasi ini dapat menciptakan sinergi antara berbagai pihak dalam meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan partisipatif di tingkat desa.
 4. Pengembangan Sistem Perencanaan Bottom-Up. Pengembangan sistem perencanaan bottom-up, seperti Musrenbang, yang diharapkan dapat menciptakan ruang publik sebagai wadah partisipasi masyarakat, juga merupakan peluang yang signifikan. Fadil, (2013) mencatat bahwa kebijakan yang mendukung partisipasi dari tingkat bawah dapat membuat proses perencanaan menjadi lebih inklusif dan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Pendekatan partisipatif seperti transect dalam Participatory Rural Appraisal (PRA) memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan dan menggunakan sumber daya yang tersedia di wilayah perdesaan, memastikan bahwa perencanaan pembangunan di desa-desa menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat (Mustanir & Yasin, 2018).

4.4 Integrasi Hasil dengan Teori Partisipasi Masyarakat

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Arnstein (1969), di mana partisipasi diidentikkan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh masyarakat. Keberhasilan program pembangunan sangat bergantung pada seberapa besar masyarakat terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program tersebut (Rahmawati, 2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi, tantangan yang dihadapi, dan peluang yang ada semuanya mencerminkan dinamika kekuasaan dalam proses partisipatif. Dengan meningkatkan kapasitas masyarakat, memperbaiki kepemimpinan desa, serta mengadopsi inovasi teknologi dan kebijakan yang mendukung, implementasi perencanaan pembangunan partisipatif dapat lebih efektif dalam memberikan kekuasaan kepada masyarakat untuk mengontrol dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.

5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi perencanaan pembangunan partisipatif di desa-desa Indonesia dengan fokus pada identifikasi tantangan utama yang dihadapi serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki pelaksanaannya di masa depan. Melalui metode tinjauan literatur yang komprehensif, penelitian ini berhasil mencapai tujuan tersebut dengan mengkaji berbagai studi kasus, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perencanaan pembangunan partisipatif di desa-desa Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, dominasi elite desa dalam proses pengambilan keputusan, komunikasi yang kurang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat, serta ketidakmerataan akses pendidikan. Rendahnya partisipasi masyarakat terutama disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang proses perencanaan, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa. Selain itu, struktur kekuasaan yang didominasi oleh elite desa menghambat representasi yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal seperti perempuan dan masyarakat miskin.

Di sisi lain, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan partisipatif. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur desa melalui pelatihan dan pemberdayaan terbukti menjadi strategi yang efektif dalam mendorong partisipasi yang lebih aktif dan produktif. Reformasi kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat, serta penguatan kerangka hukum, juga diakui sebagai langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Selain itu, inovasi dalam metode partisipasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penguatan kolaborasi antara pemerintah desa, organisasi non-pemerintah, dan lembaga akademis memberikan peluang signifikan untuk menciptakan proses perencanaan yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Penelitian ini juga memberikan rekomendasi praktis yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya. Pertama, pentingnya melibatkan masyarakat secara lebih aktif melalui program pelatihan dan pemberdayaan yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak dan peran mereka dalam perencanaan pembangunan. Kedua, pemerintah desa perlu meningkatkan transparansi dan efektivitas komunikasi dengan masyarakat untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan partisipasi. Ketiga, adopsi teknologi informasi harus dipertimbangkan untuk memfasilitasi partisipasi yang lebih luas dan inklusif, serta pengembangan sistem perencanaan bottom-up yang lebih nyata dan berdampak. Terakhir, penguatan kolaborasi antar berbagai pihak, termasuk LSM dan lembaga akademis, diharapkan dapat mendukung implementasi perencanaan partisipatif yang lebih efektif dan inovatif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa sebagai fondasi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang yang tersedia, implementasi perencanaan pembangunan partisipatif di desa-desa Indonesia dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat lokal dan mendukung terciptanya pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi mereka.

Limitasi dan Studi Lanjutan

Limitasi Penelitian

Meskipun penelitian ini telah memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi perencanaan pembangunan partisipatif di desa-desa Indonesia, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diakui:

1. Pendekatan Tinjauan Literatur: Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur, yang berarti hanya mengandalkan data dan studi yang telah dipublikasikan sebelumnya. Pendekatan ini membatasi kemampuan untuk memperoleh data primer yang dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang praktik dan dinamika terkini di lapangan.
2. Keterbatasan Data Sekunder: Kualitas dan cakupan data yang digunakan dalam penelitian ini tergantung pada ketersediaan dan kualitas studi yang telah dipublikasikan. Beberapa aspek implementasi partisipatif mungkin belum banyak diteliti atau didokumentasikan, sehingga kurang tercermin dalam analisis.
3. Generalizability: Karena penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer atau studi lapangan langsung, hasilnya mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan variasi dan dinamika spesifik di setiap desa di Indonesia. Hal ini dapat mempengaruhi generalisasi temuan ke konteks yang lebih luas.
4. Bias Publikasi: Studi yang dipilih mungkin memiliki bias publikasi, di mana penelitian yang menunjukkan hasil positif lebih mungkin diterbitkan dibandingkan dengan yang menunjukkan hasil negatif atau tidak signifikan. Hal ini dapat mempengaruhi objektivitas hasil tinjauan literatur.
5. Keterbatasan Bahasa: Meskipun mencoba untuk memasukkan literatur dalam bahasa Indonesia dan Inggris, masih mungkin ada studi relevan dalam bahasa lain yang tidak termasuk dalam analisis, sehingga mengurangi cakupan penelitian.

Studi Lanjutan

Berdasarkan keterbatasan yang diidentifikasi, penelitian lanjutan disarankan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai implementasi perencanaan

pembangunan partisipatif di desa-desa Indonesia. Beberapa arah penelitian yang dapat dipertimbangkan antara lain:

1. Penelitian Lapangan dan Studi Kasus: Melakukan studi lapangan di beberapa desa yang telah menerapkan perencanaan pembangunan partisipatif untuk memperoleh data primer melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan pengumpulan data kuantitatif. Pendekatan ini dapat memberikan wawasan lebih rinci mengenai praktik, tantangan, dan keberhasilan yang spesifik di setiap desa.
2. Metode Campuran (Mixed Methods): Menggunakan pendekatan metode campuran yang menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh gambaran yang lebih holistik mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Survei kuantitatif dapat diikuti dengan wawancara kualitatif untuk memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi.
3. Analisis Longitudinal: Melakukan penelitian longitudinal untuk memantau perubahan dan perkembangan dalam implementasi perencanaan pembangunan partisipatif seiring waktu. Hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi tren, dampak kebijakan, dan efektivitas intervensi yang dilakukan.
4. Eksplorasi Faktor Kontekstual: Mengkaji lebih lanjut faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, seperti budaya lokal, dinamika politik, dan kondisi ekonomi, untuk memahami bagaimana berbagai faktor ini berinteraksi dan mempengaruhi implementasi perencanaan partisipatif.
5. Pengembangan dan Pengujian Model Partisipasi: Mengembangkan model partisipasi masyarakat yang lebih spesifik dan relevan dengan konteks desa di Indonesia, serta menguji model tersebut melalui studi empiris untuk menilai efektivitasnya dalam meningkatkan partisipasi dan hasil pembangunan.
6. Evaluasi Kebijakan dan Program Partisipatif: Melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan dan program partisipatif yang telah diterapkan di tingkat desa, untuk menilai kesesuaian, efektivitas, dan dampaknya terhadap pembangunan desa serta partisipasi masyarakat.
7. Teknologi Informasi dan Partisipasi: Mengkaji lebih lanjut peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, termasuk efektivitas penggunaan platform online, aplikasi mobile, dan media sosial dalam proses perencanaan pembangunan.
8. Studi Komparatif: Melakukan studi komparatif antara desa-desa yang berhasil dalam implementasi perencanaan pembangunan partisipatif dengan desa-desa yang masih menghadapi kendala, untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan.

Dengan melaksanakan studi lanjutan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan spesifik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, serta strategi yang efektif untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam perencanaan pembangunan partisipatif di desa-desa Indonesia. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori partisipasi masyarakat dan praktik pembangunan desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Referensi

- Adam, E., & Towadi, M. (2022). *Stimulasi Peran Masyarakat Dalam Membangun Ekonomi Berbasis Potensi Desa*. 6(1), 319–327. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jmm.v6i1.6358>
- Agung, E. S., Indrajat, H., Harjo, B., & Juntara, B. (2022). Strategi Local Strongman dalam Pemilihan Kepala Desa Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tahun 2019. *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(1), 47–63. <https://doi.org/10.35912/jasipol.v2i1.1558>
- Agusta, I. (2009). Percobaan Pembangunan Partisipatif Dalam Otonomi Daerah. *Sodality Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 3(2). <https://doi.org/10.22500/sodality.v3i2.5867>
- Akbar, Muh. F., Suprpto, S., & Surati. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 6(2).
- Alem, G. (2021). Urban Plans and Conflicting Interests in Sustainable Cross-Boundary Land Governance, the Case of National Urban and Regional Plans in Ethiopia. *Sustainability*, 13(6), 3081. <https://doi.org/10.3390/su13063081>

- Angreni, R. (2021). *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Musreimbang) DI Kelurahan Kadidi Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/n4ytc>
- Ardika, W. (2020). Pengembangan Desa Wisata Partisipatif-Mandatori: Studi Kasus Pada Desa Belimbing, Pupuan, Tabanan-Bali. *International Journal of Community Service Learning*, 4(4). <https://doi.org/10.23887/ijcsl.v4i4.29198>
- Arisandi, R. (2021). *Peran Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Kulo*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/rgaxc>
- Asmaria, A., Dewi, L. K., & Akbar, M. (2020). Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Pembangunan Gemma Tapis Berseri Di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. *Khazanah Sosial*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.15575/ks.v2i1.8156>
- Daraba, D. (2017). Pengaruh Program Dana Desa Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. *Sosiohumaniora*, 19(1). <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i1.11524>
- Dewi, A. K. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Rehabilitasi Lahan Pada Program Kebun Bibit Rakyat (KBR) Di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 9(1), 42. <https://doi.org/10.14710/pwk.v9i1.6525>
- Fadil, F. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 11(2).
- Fatimatu Zahroh, F., Hadi, S. P., & Purnaweni, H. (2021). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dan Analisis Aktor Pada Rehabilitasi Mangrove Di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 16(2), 257. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v16i2.9420>
- Hafrida, L., Hildawati, H., Sari, Y., Yanti, M., & Afrizal, D. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Dikelurahan Cempedak Rahuk Kecamatan Tanah Putih. *Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1). <https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i1.16962>
- Halim, A., & Adianto, A. (2021). Strategi Pengembangan Desa Melalui Pemanfaatan Dana Desa di Desa Sako Margasari. *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(2), 87–99. <https://doi.org/10.35912/jasispol.v1i2.545>
- Handoko, E. Y., & Tucunan, K. P. (2021). Pemetaan Desa Menggunakan Metode Partisipatif untuk Pembangunan Desa dan Kawasan (Desa Ngepung, Kecamatan Lengkon, Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur). *Sewagati*, 5(1), 30–35.
- Harfis. (2019). Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 1(2), 18–23. <https://doi.org/10.36917/japabis.v1i2.11>
- Hermawan, D., & Hutagalung, S. S. (2021). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata Di Lampung Selatan. *Sosiohumaniora*, 23(1), 124. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v23i1.24698>
- Hidayat, J. T., Purnamajaya, G. N., & Wakitaningsih, N. (2023). PELATIHAN PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI PENDAMPING DESA DALAM SIKLUS PERENCANAAN DESA. *Rural Development For Economic Resilience (RUDENCE)*, 2(3), 13–22.
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupiis Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974>
- Idawati. (2022). Komunikasi Pembangunan Partisipasi Membangun Objek Wisata Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat. *Medium*, 10(2), 409–420. [https://doi.org/10.25299/medium.2022.vol10\(2\).9323](https://doi.org/10.25299/medium.2022.vol10(2).9323)
- Irham. (2019). Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 172–181. <https://doi.org/10.52316/jap.v15i2.34>
- Kosunen, H., & Hirvonen-Kantola, S. (2020). Fatalism in Co-Evolutionary Urban Planning: Experiences From Infill Planning in Finland. *Planning Practice and Research*, 35(3), 251–266. <https://doi.org/10.1080/02697459.2020.1743922>
- Laily, E. I. N. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(3).

- Listyawati, R. N., Prasetyo, & Hayati, N. N. (2023). Determinasi Faktor Utama Dalam Ketidakmerataan Perkembangan Desa Di Kabupaten Jember. *Jurnal Plano Buana*, 3(2), 100–111. <https://doi.org/10.36456/jpb.v3i2.7092>
- Marlita, V. S., & Widodo, S. (2020). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sidorejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 4(2).
- Mustanir, A., & Yasin, A. (2018). *Partisipasi Masyarakat dalam Transect pada Perencanaan Pembangunan Community Participation in Transect on Development Planning*. <http://ojs.unm.ac.id/iap>
- Nabilah. (2021). *Partisipasi Masyarakat Dalam Musrembang Di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ucm5r>
- Nurhaliza, W. O. S. (2023). Komunikasi Partisipatif Masyarakat Bajo Mola Raya Dalam Pengembangan Desa Di Kabupaten Wakatobi. *Jurnal Ilmu Komunikasi Uho Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi Dan Informasi*, 8(3), 571–586. <https://doi.org/10.52423/jikuho.v8i3.94>
- Pertiwi, N. E., & Nugroho, P. (2022). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dan Strategi Pengembangan Kegiatan Kebun Bibit Desa (Kbd) Di KTH Wonosari Tani Iv Desa Wonorejo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar. *Gorontalo Journal of Forestry Research*, 5(1), 23. <https://doi.org/10.32662/gjfr.v5i1.1805>
- Purwaningsih, M. R. (2022). Pelaksanaan Musrenbang Daerah Dalam Proses Perencanaan Dan Penganggaran Partisipatif. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 6(1), 151–164.
- Rahmat, D., & Hermana, D. (2020). Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Untuk Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa. *Jurnal Publik*, 12(2), 13–17. <https://doi.org/10.52434/jurnalpublik.v12i2.3>
- Rahmawati, E. (2022). Gerbang Maca: Strategi Inovatif Dalam Pengembangan Layanan Disarpus Sebagai Sumber Belajar Masyarakat Kab. Indramayu. *Inovasi Kurikulum*, 19(2), 143–158. <https://doi.org/10.17509/jik.v19i2.44049>
- Rendra, M. I., Huda, M. M., Sandy, R. A., Roisewajid, S., Saputra, R. Y., & Abrori, A. N. (2024). Penyusunan Peta Administrasi Desa dengan Pemetaan Partisipatif untuk Mendukung Perencanaan dan Pembangunan Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. *Abdimas Galuh*, 6(1), 847–856.
- Rydin, Y. (2010). Actor-Network Theory and Planning Theory: A Response to Boelens. *Planning Theory*, 9(3), 265–268. <https://doi.org/10.1177/1473095210368772>
- Sikder, S. K., Eanes, F. R., Asmelash, H., Kar, S., & Koetter, T. (2016). The Contribution of Energy-Optimized Urban Planning to Efficient Resource Use—A Case Study on Residential Settlement Development in Dhaka City, Bangladesh. *Sustainability*, 8(2), 119. <https://doi.org/10.3390/su8020119>
- Silvia, S., & Sujianto, S. (2021). Efektivitas Kelompok Usaha Bersama di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(1), 67–74. <https://doi.org/10.35912/jasispol.v1i1.423>
- Sufriadi, D., & Zakaria. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Di Kabupaten Aceh Jaya. *Jurnal Pengabdian Nasional (Jpn) Indonesia*, 2(2), 62–72. <https://doi.org/10.35870/jpni.v2i2.34>
- Sunarti, S. (2022). Tantangan Pengembangan Wisata Berdasarkan Dinamika Partisipasi Masyarakat Desa Montongsari, Kabupaten Kendal. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 18(4), 367–380. <https://doi.org/10.14710/pwk.v18i4.49740>
- Susetiawan, S., Mulyono, D. C., & Roniardian, M. Y. (2018). Penguatan peran warga masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan desa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, 4(1), 109–118.
- Sutrisna, I. W. (2023). Pengelolaan Keuangan Yang Partisipatif Dalam Mewujudkan Demokrasi Anggaran di Desa. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 6(1), 85–94.
- Tuhana, A. S. M., Daerobi, A., & Mulyanto, M. (2022). Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 1(1), 25–43. <https://doi.org/10.35912/sekp.v1i1.1174>

- Wahyudi, H., & Khotimah, S. N. (2022). Pengaruh Dana Desa dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung. *Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 1(1), 45–57. <https://doi.org/10.35912/sekp.v1i1.1423>
- Wahyuni, L., Hijeriah, E. M., & Rejeki, M. (2022). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kepenghuluan Mumugo Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 4(2), 31–40. <https://doi.org/10.36917/japabis.v4i2.52>
- Yusuf, S., Umanilo, M. C. B., & Ar, N. (2020). Relasi Kepala Desa Dan Badan Perwakilan Desa Dalam Pemanfaatan Dana Desa Di Kecamatan Namlea. *Sosioglobal Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 4(2), 130–140. <https://doi.org/10.24198/jsg.v4i2.25251>
- Zhao, N. (2023). Institutionalization of Public Interest in Planning: Evolving Mechanisms of Public Representation in China's Urban Regeneration Policymaking. *Planning Theory*, 23(3), 219–242. <https://doi.org/10.1177/14730952231206418>